

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG PERIODE TAHUN 2019-2022

Weny Putri¹, Khairunnisa², Nelly³, Nadilah⁴

weny_putri@ukmc.ac.id, khairunnisa@ukmc.ac.id, nelly@unisti.ac.id,
nadilahdilak@gmail.com

Universitas Katolik Musi Charitas Palembang^{1,2}
Universitas Sjakhyakirti Palembang^{3,4}

ABSTRACT

This research aims to determine the performance analysis of regional income and expenditure budget management in the Palembang city financial and asset management agency. This type of research is quantitative descriptive research. This research was conducted at the Palembang City Financial and Asset Management Agency. The variable in this research is the performance of regional revenue and expenditure budget management in the city of Palembang. The data used are primary data and secondary data with documentation data collection techniques. Based on the results of research that has been carried out on all data obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency of the city of Palembang, several conclusions can be drawn, including that the original regional income received is smaller than the central government transfer income, and is still insufficient or not yet optimal. Independence: The performance of the Palembang city government is still low with an average of 60.5%, with an effectiveness of 69.5% and an efficiency level of 96%. Thus, it can be said that the Palembang city government has not performed well in terms of realizing the planned PAD.

Keywords: *performance of regional budget and expenditure management*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Palembang sebagai salah-satu kota di Sumatera Selatan memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Sektor-sektor yang ada di kota Palembang antara lain sektor industri, sektor pertanian, sektor perdagangan dan jasa, sektor pariwisata, dan sektor infrastruktur perkotaan.

Laju pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam kinerjanya., menurut laporan kinerja instansi pemerintah kota Palembang yang disusun tahun 2022 masih dalam pengawasan untuk kemajuan laju pertumbuhan ekonomi kota Palembang dengan berdasar pada pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laju pertumbuhan ekonomi kota Palembang pada beberapa sektor melambat, hal ini berdampak pada total pertumbuhan ekonomi kota Palembang lebih kecil.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang pada Tahun 2019-2022

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2019	5,50-6,00	5,94	103,5
2020	5,55-6,05	5,94	102,5
2021	5,5	3,17	57,6
2022	5,50-6,00	5,23	91

sumber : <https://palembangkota.bps.go.id/data> yang dikelola)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa indikator kinerja pertumbuhan ekonomi di kota Palembang secara keseluruhan dihitung membandingkan target pertumbuhan ekonomi kota Palembang dan realisasi untuk mendapatkan capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi yakni, ditahun 2019 dengan target 5,50-6,00 % kota Palembang hanya bisa realisasikan 5,94 % sehingga pencapaian kinerja di angka 103,5%. Tahun 2020 dengan target yang meningkat 0,5% namun realisasi tetap 5,94% menyebabkan penurunan kinerja laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Terjadi penurunan yang signifikan ditahun 2021 dengan target yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya namun realisasi hanya 3,17% sehingga capaian kinerja pertumbuhan ekonomi hanya 57,6%. Ditahun 2022 kota Palembang dengan target yang tetap namun bisa membenahi realisasi dengan 5,23% sehingga capaian kinerja pertumbuhannya meningkat sebesar 91%. Dapat disimpulkan bahwa Laju pertumbuhan ekonomi di kota Palembang masih belum maksimal dari capaian indikator kinerjanya. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi kota Palembang masih harus dimaksimalkan dengan indikator kinerja maupun sektor ekonomi yang ada di kota Palembang agar kedepannya dapat menentukan lebih jelas tentang laju pertumbuhan ekonomi kota Palembang.

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi (*Jurnal.unpad.ac.id/*). Kinerja ekonomi adalah gambaran berbagai indikator pencapaian aspek ekonomi yang dilakukan dan diberikan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-apbd/>).

Fungsi dari APBD sebagai pengawasan anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Tabel 2. Kinerja APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Palembang Tahun 2019-2022 (dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2019		2020		2021		2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	4.639,49	3.987,55	4.644,41	3.695,47	4.173,13	3.690,80	3.848,55	3.318,04
PAD (pendapatan asli daerah)	1.652,65	1.081,11	1.844,72	1.032,72	1.555,35	1.158,87	1.337,34	1.130,78
TF PUSAT (Transfer pemerintah pusat)	2.138,99	2.029,78	2.108,85	1.996,73	1.823,03	1.826,79	1.735,01	1.499,15
Lain-lainnya	847,85	876,65	690,84	666,02	785,75	705,15	776,20	688,12

BELANJA DAERAH	4.382,55	3.968,21	4.679,52	3.688,14	4.329,49	3.547,20	3.817,56	3.038,72
Pegawai	1.821,48	1.576,10	1.948,77	1.543,62	1.663,02	1.402,50	1.466,68	1.316,60
Barang Jasa	1.259,99	1.204,10	1.425,12	1.136,73	1.412,99	1.272,53	1.426,76	935,24
Modal	1.228,06	1.115,91	1.240,87	885,86	1.043,98	798,82	644,05	755,43
Lain-lainnya	73,02	72,09	64,77	121,97	209,49	73,34	280,06	31,45
SURPLUS/DEFISIT	256,94	19,34	(35,11)	7,33	(156,36)	143,6	30,99	279,32

(sumber : <https://palembangkota.bps.go.id/data yang dikelola>)

Dalam tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa anggaran pendapatan dari tahun 2019 sampai 2022 tidak seimbang dengan realisasi pendapatan kota Palembang. Terlihat ditahun 2019 anggaran pendapatan sebesar 4.639,49 M dengan realisasinya sebesar 3.987,55 M sehingga memiliki selisih 651,94 M. Ditahun 2020 anggaran pendapatan sebesar 4.644,41 M dengan realisasinya sebesar 3.695,47 M sehingga memiliki selisih 948,94 M lebih tinggi angkanya dibanding tahun sebelumnya. Ditahun 2021 anggaran pendapatan 4.173,13 M dengan realisasi sebesar 3.690,80 M sehingga memiliki selisih 482,33 M. Ditahun 2022 terjadi penurunan anggaran pendapatan sebesar 3.848M namun hanya dapat direalisasikan di angka 3.318 M saja yang artinya terdapat selisih Surplus sebesar 530 M. Yang artinya pemerintah belum bisa mendapatkan rencana anggaran di empat tahun terakhir dengan baik serta perencanaan anggaran tersebut yang masih belum bisa diminimalisir selisihnya.

Diluar daripada itu, dapat dilihat pada tabel diatas untuk membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja daerah kota Palembang sama sekali belum mandiri untuk menutupi pembelanjaan daerahnya dengan pendapatan asli daerahnya sendiri. Dibuktikan dengan angka pada tabel selama tahun 2019 sampai 2022 pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan lebih dari 50% dari keseluruhan pendapatan kota Palembang. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemberian dana dari pemerintah pusat dan merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota Palembang dimana dalam hal ini pendapatan asli daerah selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Ini mengakibatkan ketimpangan teori dengan kenyataan yaitu semakin tinggi rasio kemandirian pemerintah daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2016:140).

Secara kemandirian kota Palembang memiliki permasalahan berkaitan dengan masih rendahnya kemandirian keuangan daerah di kota Palembang. Beberapa faktornya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah serta pemanfaatan dan pengelolaan PAD yang belum optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah kota Palembang. Hal tersebut juga menandakan masih sangat bergantungnya pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemandirian keuangan yang rendah di kota Palembang akan berdampak pada jalannya pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat di kota Palembang. Mengarah pada transparansi pemerintah harus terbuka dalam menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang. Informasi bisa diakses lewat internet atau website resmi, namun hanya angka yang kurang terperinci dan masyarakat belum banyak yang mengerti tentang perhitungan pendapatan asli daerah serta anggaran dana dari pemerintahan membuat masyarakat kurang pengetahuan tentang bagaimana kinerja pemerintah.

Mengarah pada akuntabilitas bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang masuk dan keluar berperan penting dalam kemajuan pembangunan daerah kota Palembang. Adanya hubungan perencanaan dan realisasi menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja pada unsur bidang lainnya. Namun dari perencanaan sampai dengan laporan realisasi ini merupakan ketimpangan antara indikator akuntabilitas dengan keadaan yang sesungguhnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk penelitian dengan judul “*Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Palembang Periode Tahun 2019-2022*”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKAD kota Palembang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui analisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah (BPKAD) kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian APBD

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan menurut Bastian (2006:189), “APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja PEMDA dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Selain itu menurut Mahsun (2013:145), menyatakan bahwa “anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter”. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam perencanaan keuangan tahunan yang lebih konkret. Ulasan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijalankan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengerahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin keseimbangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Laporan Keuangan Daerah

Pengertian laporan keuangan menurut peraturan menteri keuangan, “laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara sejumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode, (Bastian, 2006:387). Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 (2020:5), Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangandaerah.

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian pekerjaan terhadap suatu tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi suatu penggunaan sumber daya menghasilkan barang jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa yang diserahkan kepada pelanggan seorang dan sampai jauh mana pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan maksud yang diinginkan; dan atau efektifitas tindakan untuk mencapai tujuan Mahsun, dkk (2016:141)

Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis pendapatan dan belanja daerah secara umum dapat terlihat dari laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan untuk menilai efektif dan efisien, sejauh mana pemerintah daerah melakukan efisien anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan mengeluarkan yang tidak tepat sasaran.

Kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dan hal itu menunjukkan efisien belanja. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanjakarena hal itu terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas. Berdasarkan informasi dari laporan realisasi anggaran belanja, dapat dianalisis kinerja belanja dengan beberapa analisis sebagai berikut: (Abdul Halim, 2011).

Selisih Anggaran Pendapatan

Analisis selisih anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi anggaran pendapatan dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi anggaran pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian.

Analisis Derajat Desentralisasi

Derajat dihitung berdasarkan perbandingan antar pendapatan asli daerah dengan penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Efektif dan Efisien Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektif keuangan daerah otonomi (selanjutnya disebut "Rasio EKD") menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektif menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Abdul Halim 2007:169).

Analisis Selisih Belanja

Analisis selisih belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, maka dapat diketahui secara langsung varians belanja antara anggaran belanja dan realisasinya

yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasinya. Kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik jika realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja sangat bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Analisis Efisien Belanja

Analisis efisien belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisien ini tidak absolut, tetapi relatif. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisien kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan.

Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat digunakan untuk mengetahui pola anggaran pemerintah daerah. Juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling urgen analisis pembiayaan ini adalah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Makin besar SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran padat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana, maka porsi untuk ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis belanja meliputi Rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja; Rasio belanja operasi terhadap total belanja; Rasio belanja modal terhadap total belanja; Rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja. Fathah (2017), Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase efektivitas
100 % Keatas	Efektif
100 %	Efektivitas berimbang
Kurang dari 100 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun (2012).

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100 % Keatas	Tidak efisien
100 %	Eisiensi berimbang
Kurang dari 100 %	efisien

Sumber: Mahsun (2012)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: menurut Abdul Halim, 2007

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan untuk mengetahui analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKAD

kota Palembang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Definisi Konsep Dan Operasional Variabel

Definisi Konsep

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi (2001:121) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.

Operasional Variabel

Operasional variabel adalah variabel penelitian yang dimaksudkan memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana (V.Wiratna, 2015: 77).

Tabel 6. Operasional Variabel

No.	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator
1.	Rasio Efektifitas	Perhitungan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.	Realisasi PAD Anggaran PAD
2.	Rasio Efisiensi	Perhitungan secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.	Realisasi belanja daerah Realisasi pendapatan daerah
3.	Rasio Kemandirian	Perhitungan dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat.	Pendapatan asli daerah Pendapatan Transfer

Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada BPKAD yang beralamat di Jl.Sekanak No.46,22 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari database di website resmi bebas izin dari pemerintah kota Palembang dan badan terkait (Bps.go.id/palembang.go.id) hasil dari Laporan Kinerja di setiap tahunnya didapatkan langsung dari BPKAD kota Palembang dan data sekunder dalam penelitian ini berupa APBD kota Palembang.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi dengan cara mengumpulkan data laporan APBD pada BPKAD Kota Palembang.

Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menganalisis data laporan realisasi APBD menggunakan rumus rasio keuangan pemerintah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif yaitu untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian menganalisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selama 4 tahun dari tahun 2019-2022 dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Palembang
(dalam Jutaan Rupiah)**

Uraian	2019		2020		2021		2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	4.639,49	3.987,55	4.644,41	3.695,47	4.173,13	3.690,80	3.848,55	3.318,04
PAD (pendapatan asli daerah)	1.652,65	1.081,11	1.844,72	1.032,72	1.555,35	1.158,87	1.337,34	1.130,78
TF PUSAT (Transfer pemerintah pusat)	2.138,99	2.029,78	2.108,85	1.996,73	1.823,03	1.826,79	1.735,01	1.499,15
Lain-lainnya	847,85	876,65	690,84	666,02	785,75	705,15	776,20	688,12
BELANJA DAERAH	4.382,55	3.968,21	4.679,52	3.688,14	4.329,49	3.547,20	3.817,56	3.038,72
Pegawai	1.821,48	1.576,10	1.948,77	1.543,62	1.663,02	1.402,50	1.466,68	1.316,60
Barang Jasa	1.259,99	1.204,10	1.425,12	1.136,73	1.412,99	1.272,53	1.426,76	935,24
Modal	1.228,06	1.115,91	1.240,87	885,86	1.043,98	798,82	644,05	755,43
Lain-lainnya	73,02	72,09	64,77	121,97	209,49	73,34	280,06	31,45
SURPLUS/DEFISIT	256,94	19,34	(35,11)	7,33	(156,36)	143,6	30,99	279,32

(sumber : <https://palembangkota.bps.go.id/data> yang dikelola)

Berdasarkan pada data anggaran dan realisasi pendapatan pemerintah Kota Palembang selama 4 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kota Palembang belum memberikan kontribusi positif untuk penambahan pendapatan asli daerah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Masalah lain terjadi pada pendapatan transfer selama 5 lima tahun dari tahun 2019-2022 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah kota Palembang mengalami penurunan akibat dari target pendapatan transfer dari pemerintah pusat menurun dan tertundanya penyaluran sebagian dana tersebut sebagai tidak tercapainya target pendapatan daerah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana tingkat efisiensi, efektifitas dan kemandirian terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palembang tahun anggaran 2019-2022 untuk menilai kinerja Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Selain daripada Rasio keuangan yang akan dihitung, penelitian ini juga akan membahas bagaimana pengukuran kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang ditinjau dari Transparansi dan Akuntabilitas.

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ditinjau dari Segi efektivitas

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Hasil dari perhitungan rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektifitas PAD pada BPKAD
Kota Palembang tahun 2019-2022**

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (dalam miliar)	Realisasi PAD (dalam miliar)	REPAID (%)	Kriteria
2019	1.652,65	1.081,11	65	Tdk Efektif
2020	1.844,72	1.032,72	55	Tdk Efektif
2021	1.555,35	1.158,87	74	Tdk Efektif
2022	1.337,34	1.130,78	84	Tdk Efektif
Rata-rata	1.597,515	1.100,87	69,5	Tdk Efektif

Sumber data: BPS (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD kota Palembang rata-rata selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD kota Palembang pada tahun 2019 sebesar 65%, tahun 2020 sebesar 55%, tahun 2021 naik 19% menjadi 74%. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan 10% menjadi 84%. Efektivitas kinerja keuangan kota Palembang untuk tahun 2019-2022 tergolong kurang efektif karena hasil menunjukkan di dibawah 100%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD kota Palembang yang belum efektif karena rata-rata efektivitasnya di dibawah 100% yaitu 69,5%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah kota Palembang juga dapat dikatakan belum memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Pemerintah kota Palembang harus terus mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatannya yang sudah telah ada dan mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Pemerintah Daerah diharapkan tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Alternatif yang memungkinkan untuk meningkatkan potensi daerah antara lain mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ditinjau dari Segi efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9. Perhitungan Rasio Efisiensi PAD pada BPKAD
Kota Palembang tahun 2019-2022**

Tahun Anggaran	Realisasi belanja (dalam miliar)	Realisasi Pendapatan (dalam miliar)	REKD (%)	Kriteria
2019	3.968,21	3.987,55	99	Efisien
2020	3.688,14	3.695,47	99	Efisien
2021	3.547,20	3.690,80	96	Efisien
2022	3.038,72	3.318,04	91	Efisien
Rata-rata	3.560,56	3.672,96	96,25	Efisien

Sumber data: BPS (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah kota Palembang dari tahun 2019 sampai dengan 2022 rata-rata mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 pendapatan daerah kota Palembang sebesar 3.987,55 M turun menjadi 3.695,75 M pada tahun 2020. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 3.690,80 M Dan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang drastis pendapatan daerah menjadi 3.318,04 M. Penurunan pendapatan daerah disertai dengan penurunan pula belanja daerah dari tahun ketahun. Total belanja daerah kota Palembang tahun 2019 sebesar 3.968,21 M mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 3.688,14 M pada tahun 2021 turun menjadi 3.547,20 M kemudian di tahun 2022 menjadi 3.038,72 M

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah kota Palembang 2019 sampai dengan 2022 sebesar 96,25% atau dapat dikatakan efisien karena kurang dari 100%. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Palembang untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar namun bisa tertutup dengan pendapatan itu sendiri. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah kota Palembang dalam hal ini cukup baik karena sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya disesuaikan dengan pendapatan daerah. Untuk ke depannya diharapkan Pemerintah kota Palembang dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya.

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ditinjau dari Segi kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat di lihat di Tabel di bawah ini:

**Tabel 10. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Palembang
Tahun 2019-2022**

Tahun anggaran	Realisasi PAD (dalam miliar)	Pendapatan Transfer (dalam miliar)	RKKD %	Kemampuan keuangan
2019	1.081,11	2.029,78	53	Sedang
2020	1.032,72	1.996,73	51	Sedang
2021	1.158,87	1.826,79	63	Sedang
2022	1.130,78	1.499,15	75	Sedang
Rata-rata	1.100,87	1.838,11	60,5	Sedang

Sumber data: BPS (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami penurunan dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Berawal pada tahun 2019 Rasio Kemandirian sebesar 53% kemudian turun menjadi 51% di tahun 2020. Tahun 2021 Rasio Kemandirian naik menjadi 63%. Kemudian di tahun 2022 naik lagi menjadi 75%. Walaupun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 50%-75% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah selama empat tahun pada pemerintah kota Palembang memiliki rata-rata 60% kemandiriannya masih tergolong sedang dan dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 50-75%. Rasio kemandirian yang sedang menggambarkan kemampuan keuangan daerah kota Palembang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih tergantung bantuan dari pemerintah pusat

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya yang disertai dengan perhitungan untuk melihat realisasi pendapatan, efektifitas, efisiensi dan Kemandirian dalam meningkatkan kinerja pemerintah, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palembang selama 4 tahun masih kurang atau belum optimal, berikut penjabarannya :

1. Jika dilihat pada aspek kemandirian daerah Kota Palembang tergolong rendah, yaitu dalam 4 tahun rata-rata persentase kemandiriannya hanya 60,5% pemerintah Kota Palembang belum mandiri karena tidak terealisasinya pendapatan asli daerah (PAD) dan retribusi daerah.
2. Dilihat dari perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah kota Palembang 2019 sampai dengan 2022 sebesar 96% atau dapat dikatakan efisien karena kurang dari 100%. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Palembang untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar namun bisa tertutup dengan pendapatan itu sendiri. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah kota Palembang dalam

hal ini cukup baik karena sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya disesuaikan dengan pendapatan daerah.

3. Serta dilihat dari efektifitas PAD kota Palembang yang belum efektif karena rata-rata efektifitasnya di dibawah 100% yaitu 69,5%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah kota Palembang juga dapat dikatakan belum memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Palembang diharapkan berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan pemerintah Kota Palembang semakin berkurang.
2. Pemerintah Kota Palembang perlu melakukan upaya maksimal meningkatkan usaha pemungutan pendapatan asli daerah lebih intensif dan aktif, perlu menetapkan target lebih baik dan terukur, perlu melakukan penyesuaian terkait dengan usaha peningkatan pendapatan asli daerah, perlu memperbaiki kinerja BUMD, perlu mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru tanpa menunggu ketetapan dari pemerintah pusat. Mengevaluasi setiap 1 bulan sekali atau bahkan setiap minggu, agar kinerja pemerintah Kota Palembang dapat dilaksanakan sesuai dengan target.
3. Meningkatkan retribusi daerah Kota Palembang bersama BUMN dan BUMD serta masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisa. Jakarta, Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2011. Analisis Investasi. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat. American Accounting Association (AAA). 1916. Amerika. American Institute of
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta: Salemba.
- Mahmudi, 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, M. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPF.
- Pemerintah Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 17 Pasal 32 tentang Keuangan Negara. Lembaran RI Tahun 2004, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pusat. Lembaran RI Tahun 2004, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat. Lembaran RI Tahun 2022, No. 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.1
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2001. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.